

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**
**(Studi Kasus di Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi
Jawa Timur)**

Nurul Izza Fitriani¹, Sunariyanto², Agus Zainal Abidin³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: nfitriani190@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam era globalisasi seperti saat ini teknologi informasi menjadi kunci penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan. Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini mempengaruhi masyarakat dan pemerintahan, yang di mana dapat mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan berbasis teknologi informasi guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan bebas biaya. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memberikan pelayanan administrasi yang lebih efisien dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Kebonwaris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data oleh Miles – Huberman. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Kebonwaris sudah cukup efektif. Tiga indikator yang terpenuhi adalah efisiensi, kecukupan, dan kelayakan, di mana aplikasi IKD meningkatkan efisiensi pengurusan dokumen, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan dokumen dalam satu platform, dan memiliki sistem keamanan yang andal. Namun, ada dua indikator yang belum terpenuhi adalah kesamaan (karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan) dan responsivitas (karena rendahnya literasi digital masyarakat).

Kata Kunci: Efektivitas, Program Aplikasi IKD, Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pendahuluan

Arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk sektor pemerintahan. Pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk mengadopsi pelayanan berbasis teknologi informasi guna memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan bebas biaya kepada masyarakat. Di sektor publik, khususnya pemerintahan Indonesia, perubahan sistem mempengaruhi layanan publik. Teknologi kini menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (Naqibah, Cikusin, dan Abidin, 2021; 22).

Dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus terus berupaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwasannya:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pihak lain dalam sebuah lembaga, tidak hanya dalam organisasi bisnis tetapi juga di organisasi pemerintah. Pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat desa, di mana pemerintah desa memahami kebutuhan dan keluhan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan administrasi desa sangat penting, dan peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah meluncurkan inovasi baru berupa aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan. Aplikasi ini menyediakan informasi

elektronik dan data kependudukan secara online, sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa “IKD adalah bentuk informasi elektronik untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data terkait”.

Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan merekam, menyimpan, dan mengelola data kependudukan secara digital. Hal ini memudahkan akses ke layanan publik seperti pembuatan KTP, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kabupaten Pasuruan, yang menghadapi masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena rendahnya pemahaman masyarakat, menerapkan digitalisasi ini. Namun, antusiasme warga untuk menggunakan IKD masih rendah, dengan cakupan KTP digital belum mencapai dua persen. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan penggunaan IKD oleh ratusan ribu masyarakat.

Desa sebagai unit administratif terkecil memiliki peran penting dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Namun, banyak desa masih menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan optimal akibat proses manual yang lambat dan rawan kesalahan. Adopsi teknologi IKD diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan layanan yang lebih responsif. Untuk mencapai potensi penuh IKD, diperlukan pemahaman mendalam tentang tantangan, manfaat, dan strategi implementasi yang tepat.

Pra-penelitian melalui wawancara dan observasi menemukan bahwa masyarakat masih enggan beralih ke KTP digital, lebih memilih KTP fisik karena proses aktivasi IKD dianggap rumit dan tidak praktis. Rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi IKD. Beberapa masyarakat juga terkendala oleh ketiadaan smartphone yang kompatibel atau keterbatasan kemampuan teknologi, terutama generasi di atas 40 tahun. Program ini dirancang untuk mempermudah pengurusan KTP digital guna meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti mengurangi kebutuhan fotokopi KTP. Namun, untuk menilai keberhasilannya, diperlukan evaluasi efektivitas implementasi program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kajian ini dituangkan dalam penelitian skripsi berjudul **"Efektivitas Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kebonwaris Kecamatan**

Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur."

Rumusan Masalah

1. Bagaimana potrait dari program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Kebonwaris dalam pelayanan administrasi kependudukan?
2. Bagaimana efektivitas implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Kebonwaris dalam pelayanan administrasi kependudukan?
3. Kendala apa saja dalam pelaksanaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan administasi kependudukan di Kelurahan Kebonwaris?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis portrait dari program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Kebonwaris dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Kebonwaris dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kendala pelaksanaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian di masa depan dan menjadi referensi untuk tema serupa. Serta dapat memperluas wawasan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang aplikasi IKD di Kelurahan Desa Kebonwaris, membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi, serta memberikan saran kepada pemerintah desa terkait optimalisasi aplikasi IKD untuk pelayanan publik.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Agus Widiyarta dan Isni Humaidah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya”. Penelitian di Kelurahan Jepara, Kota Surabaya, mengungkap kendala dalam implementasi aplikasi IKD, seperti

rendahnya kepemilikan smartphone di kalangan warga dan kurangnya antusiasme terhadap aktivasi IKD. Selain itu, perangkat SIAK yang digunakan pegawai sering terganggu jaringan lemot. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi aktivasi IKD dalam mendukung digitalisasi menggunakan model kebijakan George C. Edward III. Temuan menunjukkan ketidakselarasan kebijakan, di mana Dinas Kependudukan mendorong penggunaan IKD, tetapi banyak instansi masih meminta dokumen fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan dokumentasi.

2. Moch. Andre Firmansyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya”. Penelitian di Kelurahan Kandangan menunjukkan bahwa pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah tergolong efektif, meskipun belum sempurna. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program layanan IKD berdasarkan empat indikator: ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Hasilnya menunjukkan efektivitas yang baik, namun terdapat kendala, terutama pada warga lansia yang kurang memahami teknologi. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
3. Restu Widyo Sasongko (2023) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung”. Penelitian ini bertujuan menciptakan ketertiban administrasi kependudukan dan menjamin hak warga atas layanan publik terkait identitas kependudukan. Menggunakan teori George C. Edward III dan metode studi pustaka (library research), penelitian ini menemukan bahwa Disdukcapil Kabupaten Bandung memiliki kesiapan memadai untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital berdasarkan analisis data dan informasi yang diperoleh.
4. Zelfi Nanda Gustiana dan Syafrudin Pohan (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai”. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum memahami akan penggunaan dari program IKD ini, serta masih minimnya minat masyarakat untuk beralih dari KTP fisik ke IKD dalam bentuk digital. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengkaji efektivitas

program pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen, dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan situasi nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus di Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, karena karakteristik pedesaannya yang unik memengaruhi pelaksanaan program nasional di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan menyelesaikan masalah, dengan teknik survei, wawancara, dan observasi untuk penuturan, analisis, dan klasifikasi data.

Fokus Penelitian

1. Potret program aplikasi IKD mencakup penggunaan identitas penduduk melalui smartphone untuk mempermudah verifikasi tanpa dokumen fisik, meliputi penjelasan program, proses aktivasi, dan hasilnya.
2. Efektivitas program aplikasi IKD diukur menggunakan lima indikator teori efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis*, yaitu: Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan atau Perataan, Responsivitas, dan Kelayakan atau Ketepatan.
3. Kendala dalam pelaksanaan program aplikasi IKD meliputi kurangnya pelatihan dan sosialisasi, rendahnya antusiasme dan literasi digital, serta masalah teknis pada aplikasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kebonwaris, yang terletak di Dsn. Patebon, Jl. Raya Pandaan - Bangil No.1, Pateban, Kebonwaris, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156. Peneliti mengambil lokasi ini untuk melakukan penelitian karena di kantor desa ini merupakan salah satu desa yang telah menerapkan inovasi baru pelayanan publik yakni program aplikasi IKD ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital saat ini.

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Sumber data penelitian ini mencakup wawancara dengan Kepala Desa Kebonwaris, staf administrasi kependudukan, serta warga

Desa Kebonwaris yang sudah dan belum menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Wawancara dilakukan langsung untuk mendapatkan data mengenai efektivitas program IKD.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data utama dalam penelitian. Data ini dapat dianggap sebagai sumber tidak langsung yang memberikan informasi kepada peneliti. Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai dokumen seperti catatan, rekaman, gambar, foto, serta hasil observasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Esternberg (2002) menyebutkan tiga jenis wawancara: wawancara terstruktur yang menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan dan seragam untuk semua responden; wawancara semi-terstruktur yang lebih fleksibel untuk menggali masalah terbuka; dan wawancara tidak terstruktur yang bebas tanpa pedoman sistematis, memungkinkan pengumpulan data lebih mendalam. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi rinci.

Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang sudah direncanakan untuk memperoleh data dari Kepala Desa, Sekretariat Desa, dan Kaur Perencanaan, guna mengetahui efektivitas Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Kebonwaris, dengan kemungkinan pengembangan pertanyaan di lapangan.

2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2018), observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan karena data atau fakta yang diperoleh melalui observasi menjadi landasan bagi ilmuwan. Tujuan observasi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas layanan administrasi kependudukan dengan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hasil observasi menunjukkan bahwa layanan administrasi lebih efisien dengan penggunaan IKD, meskipun masih ada beberapa kendala dalam implementasinya.

Penulis melakukan pengamatan langsung di Bagian Administrasi Kependudukan Kantor Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, pada Mei-November 2024, dan secara terbuka mengungkapkan

tujuan penelitian untuk transparansi. Data dikumpulkan melalui keterlibatan aktif dalam aktivitas sehari-hari responden.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Metode ini digunakan untuk mencari data terkait hal atau variabel tertentu yang tersedia dalam bentuk catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan metode Miles-Huberman, yang terdiri dari beberapa komponen analisis:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah tahap penting dalam penelitian, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dicatat dalam catatan lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses menyaring, merangkum, dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan, untuk mempermudah analisis dan menarik kesimpulan yang dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang dikumpulkan dalam penelitian untuk menarik kesimpulan dan menentukan tindakan selanjutnya. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan, yang memudahkan peneliti dalam memahami penerapan program Aplikasi IKD di Kantor Desa Kebonwaris.

4. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Peneliti memastikan kesimpulan berlandaskan data yang telah direduksi dan disajikan dengan benar. Jika ada masalah atau kekurangan data, peneliti akan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi tambahan, guna memastikan hasil penelitian valid dan lengkap, serta mencegah kesalahan interpretasi.

Keabsahan Data

Uji Kredibilitas

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti memperoleh data melalui observasi langsung terhadap pengelolaan kearsipan di Bagian Administrasi Kependudukan Desa Kebonwaris, khususnya penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2. Meningkatkan Ketekunan
Ketekunan peneliti memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi yang diteliti, membantu dalam analisis komprehensif dan memastikan keakuratan serta validitas data yang diperoleh.
3. Triangulasi
Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan akurasi informasi.
4. Analisis Kasus Negatif
Kasus negatif merujuk pada data yang bertentangan dengan hasil penelitian, dan peneliti menganalisisnya untuk memastikan keakuratan hasil. Jika tidak ada data yang bertentangan, penelitian dianggap dapat dipercaya.
5. Menggunakan Bahan Referensi
Peneliti akan menggunakan referensi dan foto dokumentasi sebagai bahan pendukung untuk membuktikan keakuratan data yang ditemukan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.

Pembahasan

1. Potrait Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Kebonwaris dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a) Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memudahkan pengelolaan dokumen kependudukan secara efisien dan aman. Di Desa Kebonwaris, IKD meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan memungkinkan pendaftaran, verifikasi, dan pembaruan data seperti KK dan KTP melalui perangkat mobile atau web, tanpa dokumen fisik. Aplikasi ini juga memfasilitasi pengajuan surat pindah dan pembaruan data secara online.
- b) Proses Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Proses aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Desa Kebonwaris melibatkan beberapa langkah, yaitu pemohon mendaftar dengan NIK, email, dan nomor telepon, lalu melakukan verifikasi data dan wajah. Setelah itu, pemohon memindai barcode melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dengan bantuan petugas desa, dan menerima email berisi petunjuk aktivasi serta kode PIN. Setelah berhasil, pengguna dapat mengakses KTP

elektronik, KK digital, dan fitur lainnya dengan PIN.

- c) Hasil dari Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Kebonwaris memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat mengakses dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga melalui aplikasi tanpa perlu membawa dokumen fisik atau datang ke kantor pemerintahan, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Pemerintah desa juga merasakan manfaat dengan pelayanan yang lebih cepat dan efisien karena data kependudukan dapat diakses secara digital.

2. Efektivitas Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Kebonwaris dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam pembahasan penelitian ini, digunakan lima indikator dari teori efektivitas menurut William N. Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi (*Efficiency*)

Menurut William N. Dunn (dalam Rokiah, 2021), efektivitas dan efisiensi saling terkait dalam mencapai tujuan. Efisiensi berarti memanfaatkan sumber daya secara optimal. Kebijakan dianggap tidak efisien jika mencapai tujuan dengan cara sederhana tetapi memerlukan biaya besar dan hasilnya tidak sebanding dengan pengeluaran.

Program aplikasi IKD di Desa Kebonwaris meningkatkan efisiensi dengan mempermudah pengurusan dokumen, menghemat waktu, dan biaya. Meskipun ada biaya awal, bukti menunjukkan biaya operasional jangka panjang lebih rendah dibandingkan sistem tradisional, berkat pengurangan biaya kertas, efisiensi sumber daya manusia, peningkatan akurasi, dan penghematan biaya transportasi.

2. Kecukupan (*Adequacy*)

William N. Dunn (dalam Rokiah, 2021) menjelaskan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkaitan dengan sejauh mana efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang memunculkan masalah. Kecukupan berhubungan dengan bagaimana alternatif yang ada dapat memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah.

Program aplikasi IKD cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dengan

menyediakan dokumen kependudukan dalam satu platform. Sebelumnya, masyarakat harus membawa dokumen fisik terpisah untuk berbagai keperluan, tetapi dengan IKD, semua dokumen terintegrasi dalam aplikasi digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menghemat waktu dan tenaga.

3. Kesamaan atau Perataan (*Equity*)

Program aplikasi IKD belum diimplementasikan secara merata di Desa Kebonwaris karena kurangnya sosialisasi, terutama di daerah pedesaan. Sosialisasi aplikasi ini masih terbatas pada warga yang mengajukan permohonan KTP baru atau cetak ulang, dengan fokus utama pada kaum milenial yang lebih familiar dengan teknologi.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Antusiasme masyarakat Desa Kebonwaris terhadap aplikasi IKD masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang manfaatnya dan kebiasaan menggunakan metode manual. Literasi digital yang rendah, terutama di kalangan generasi tua, menjadi hambatan utama, membuat warga ragu atau enggan mencoba aplikasi meskipun dirancang untuk mempermudah administrasi.

5. Kelayakan atau Ketepatan (*Appropriateness*)

Aspek keamanan aplikasi IKD dianggap andal karena dirancang dengan perlindungan data yang ketat. Data pribadi dan dokumen kependudukan terhubung langsung dengan Kemendagri, memastikan informasi pengguna berada di bawah pengawasan pemerintah, terjaga kerahasiaannya, dan terlindungi dari penyalahgunaan atau akses tidak sah.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan

Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai aplikasi IKD di Desa Kebonwaris menghambat pemahaman dan minat masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Sosialisasi hanya dilakukan saat pengurusan KTP dan fokus pada kaum milenial, sementara keterbatasan keterampilan teknologi dan minimnya pelatihan menghambat adopsi aplikasi. Hal ini mengurangi efektivitas program digitalisasi layanan kependudukan.

2. Antusiasme dan Literasi Digital yang Rendah

Antusiasme masyarakat terhadap aplikasi IKD di Desa Kebonwaris masih rendah, terutama pada usia 40 tahun ke atas, karena kurangnya pemahaman teknologi dan literasi digital. Banyak yang menganggap aplikasi ini sulit digunakan, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi. Rendahnya literasi digital di desa menghambat penerapan aplikasi, karena banyak warga kesulitan menggunakan perangkat atau memahami fitur dasar aplikasi IKD.

3. Masalah Teknis pada Aplikasi

Aplikasi IKD di Desa Kebonwaris mengalami gangguan teknis, terutama server Kemendagri yang sering overload saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Masalah ini menyulitkan pengguna, terutama dengan koneksi internet lemah, untuk mengakses aplikasi atau mengunduh dokumen kependudukan. Gangguan server yang terjadi di kantor pusat menghambat akses data dan membuka dokumen kependudukan, dengan dampak yang meluas, termasuk di Desa Kebonwaris.

Kesimpulan

1. Potrait Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Kebonwaris dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) efektif dalam mempermudah masyarakat mengakses dan mengelola dokumen kependudukan secara aman dan efisien. Di Desa Kebonwaris, aplikasi ini memungkinkan pendaftaran, verifikasi, pembaruan data, dan pengajuan dokumen secara online melalui perangkat mobile atau web, tanpa perlu membawa dokumen fisik, serta terintegrasi dengan layanan publik lainnya.

Proses aktivasi aplikasi IKD melibatkan pengisian data pribadi, verifikasi wajah, pemindaian barcode melalui SIAK dengan bantuan petugas desa, dan diakhiri dengan akses dokumen digital seperti KTP dan KK menggunakan PIN.

Hasil dari adanya program aplikasi IKD di Desa Kebonwaris yakni memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat mengakses dokumen seperti KTP elektronik dan KK secara digital tanpa perlu membawa dokumen fisik, menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Bagi pemerintah desa, aplikasi ini mempermudah pelayanan, mempercepat pengurusan data, dan mengurangi biaya operasional.

2. Efektivitas Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Kebonwaris dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Efektivitas Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan secara keseluruhan sudah cukup efektif tetapi masih ada beberapa kendala atau tantangan yang di mana menyebabkan implementasi program aplikasi IKD ini kurang efektif. Hal ini dinilai sesuai dengan indikator yang digunakan. Dalam hal ini, ditandai dengan terpenuhinya indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan atau ketepatan. Terdapat 3 (tiga) indikator yang terpenuhi, pertama efisiensi, kedua kecukupan, dan yang ketiga kelayakan atau ketepatan. Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator yang belum terpenuhi pertama pemerataan atau kesamaan dan kedua responsivitas.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program aplikasi IKD mencakup berbagai aspek, mulai dari antusiasme masyarakat yang masih rendah hingga gangguan teknis pada aplikasi IKD. Di Desa Kebonwaris ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program aplikasi IKD.

Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas program aplikasi IKD di Kantor Desa Kebonwaris, penulis memberikan sejumlah saran dan rekomendasi:

1. Sosialisasi interaktif, seperti pelatihan atau penyuluhan, diperlukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap aplikasi IKD, terutama bagi warga yang kurang familiar dengan teknologi digital.
2. Pendampingan berupa pelatihan, tutorial praktis, atau bantuan teknis berkala diperlukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD.
3. Aplikasi IKD perlu pengujian dan pembaruan rutin untuk memperbaiki bug, menjaga kestabilan, dan memastikan fungsionalitas optimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Hayat, H. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hayat, H. (2018). Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing.
- Kusumastuti, A., dan Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sellang, K., Jamaluddin, dan Mustanir, A. (2019). Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya). CV. Penerbit Qiara Media.
- Sinambela, L. P, dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2014). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunariyanto, dkk. (2023). Manajemen Sektor Publik. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perkembangan E-Government.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Jurnal dan Skripsi

- Bella, V. S., dan Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat di Kecamatan Tambaksari. Jurnal SARAQ OPAT. 6 (1): 14-31.

- Fazirah, E. N, Sunariyanto, dan Abidin, A. Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota). *Jurnal Respon Publik*. 16 (9): 93-104.
- Firmansyah, M. A, dan Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (19): 2089-5364.
- Gustiana, Z. N, dan Pohan, S. (2024). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*. 2 (1): 251--257.
- Hidayat, E. S. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 5 (4): 8-16.
- Mardianti. (2020). Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara. *e-Jurnal Administrasi Negara*. 8 (4): 4456-4469.
- Ma'rufi, A. (2018). Analisis standarisasi pelayanan produk jasa pengiriman barang dalam perspektif manajemen syariah (Studi kasus PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri). Undergraduate (S1) thesis. IAIN Kediri.
- Mawuntu, P., Rares, J., dan Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*. VIII (113): 107-118.
- Naqibah, L. S, Cikusin, Y., dan Abidin, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Service (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang). *Jurnal Respon Publik*. 15 (9): 22-30.
- Nugroho, P., Mulyani, T., dan Sihotang, A. P. (2022). Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Akhir Pekan dan Malam Hari Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*. 3 (2): 37-50. E-ISSN : 2723-6447.
- Nursafri, W. F. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Kantor Desa KotaAnyar Kecamatan KotaAnyar. Skripsi. Universitas Islam Malang.
- Rokiah. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Skripsi. Universitas Lampung.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*. 5 (1). 69-86.
- Sinansari, T. (2022). PELAKSANAAN INOVASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Skripsi. Universitas Islam Malang.
- Widiyarta, A., dan Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (18): 43-51.

Website

- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2024). Tahun 2024, Pemkab Pasuruan Targetkan Ratusan Warga Sudah Miliki IKD. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tahun-2024-pemkab-pasuruan-targetkan-ratusan-warga-sudah-miliki-ikd>. Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2024.
- Disdukcapil Kota Surabaya. (2023). Kenali Manfaat dan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/>. Diakses Pada Tanggal 20 November 2024.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Kementerian PANRB Beberkan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-beberkan-strategi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik>. Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2024.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Enam Aspek, Fokus Utama Evaluasi Pelayanan Publik. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/enam-aspek-fokus-utama-evaluasi-pelayanan-publik>. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2024.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2023). Dispenduk Capil Targetkan 300 Ribu Warga Punya IKD Sebagai Pengganti KTP-el. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/dispduk-capil-targetkan-300-ribu-warga-punya-ikd-sebagai-pengganti-ktp-el>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2024.
- Radar Bromo Jawapos. (2024). Jumlah Aktivasi IKD di Kabupaten Pasuruan Masih Sangat

Rendah.

<https://radarbromo.jawapos.com/bangil/1004032888/segini-jumlah-aktivasi-ikd-di-kabupaten-pasuruan-masih-rendah>.

Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2024.

Radar Bromo Jawapos. (2023). Baru 8.749 Warga Kab Pasuruan Miliki Identitas Kependudukan Digital.
<https://radarbromo.jawapos.com/bangil/1001632684/baru-8749-warga-kab-pasuruan-miliki-identitas-kependudukan-digital>.
Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2024.